



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)**

Tahun Sidang	: 2007-2008
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BKKBN
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 29 November 2007
Waktu	: Pukul 14. ⁰⁰ WIB – selesai
Ketua Rapat	Hj. Asiah Salekan, BA/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membicarakan hasil Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2007- 2008; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BKKBN; 3. Lain-lain.
Anggota yang hadir	: 31 Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI, 4 orang anggota Ijin.

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN dibuka pukul 14.³⁰ WIB dan rapat diskors karena belum memenuhi kourum. Kemudian rapat dibuka kembali pukul 15.00 setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Dan dilanjutkan paparan dan penjelasan dari Kepala BKKBN.

KESIMPULAN / KEPUTUSAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Keuangan untuk tidak memangkas anggaran penyuluhan dan perjalanan BKKBN sehingga BKKBN dapat meningkatkan aktifitas programnya.
2. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN untuk menyediakan data kabupaten yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan data pencapaian program KB disetiap Kabupaten/Kota.

3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk memantau penggunaan DAK di Kabupaten sehingga betul-betul digunakan untuk program KB dan Kependudukan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk memfasilitasi percepatan implementasi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Komisi IX DPR RI mendukung BKKBN untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu dan terkoordinasi antara Pemerintah, Swasta, LSM dan masyarakat dalam rangka menekan laju epidemic HIV/AIDS di Indonesia.

Rapat ditutup pukul 17.⁰⁰ WIB

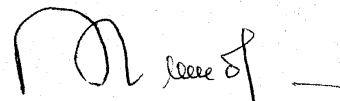
Jakarta, 29 November 2007

Pemerintah
Kepala BKKBN,

Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Dr. Sugiri Syarif, MPA



Hj. Asiah Salekan, BA